

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Manajemen Inklusif

Manajemen inklusif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi semua individu, tanpa memandang latar belakang, kemampuan, atau kebutuhan khusus. Dalam konteks organisasi atau komunitas, manajemen inklusif berfokus pada pengembangan strategi yang memastikan bahwa semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat¹⁸. Kyanula dan Quartey dalam penelitian Elpisah menekankan peran penting UKM dalam mendorong pertumbuhan inklusif, mengingat potensi mereka dalam menciptakan lapangan kerja, memacu inovasi, dan mengkatalisis pembangunan ekonomi lokal¹⁹.

Manajemen inklusif dalam bidang ekonomi merujuk pada pendekatan pengelolaan yang mengakomodasi keberagaman dan keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan. Manajemen ini menekankan pada kolaborasi antar pemangku kepentingan dengan tujuan memastikan bahwa semua individu, termasuk kelompok yang terpinggirkan, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Strategi pengelolaan yang berpusat pada masyarakat muncul sebagai mekanisme utama untuk mewujudkan pertumbuhan inklusif dalam ranah UKM²⁰. Menurut penelitian oleh Szydło et al. Manajemen inklusif di lingkungan ekonomi yang beragam melibatkan tiga dimensi utama: kognitif, afektif, dan perilaku. Studi ini menunjukkan

¹⁸ Mel Ainscow, “Developing Inclusive Education Systems: What Are the Levers for Change?,” *Journal of Educational Change* 6, no. 2 (2005): 109–24, <https://doi.org/10.1007/s10833-005-1298-4>.

¹⁹ Elpisah, “Towards Inclusive Growth: Community-Centered Management Strategies for SMEs.”

²⁰ Elpisah.

bahwa inklusivitas dalam pengelolaan bisnis dapat meningkatkan partisipasi ekonomi dan memperkuat hubungan antar budaya dalam organisasi²¹

Pertumbuhan inklusif, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian kontemporer, tetap menjadi tujuan utama dalam pembangunan ekonomi, yang menekankan pentingnya peluang dan hasil yang adil di seluruh masyarakat. Ranieri dalam penelitian Elpisah²², menggarisbawahi bahwa pertumbuhan inklusif tidak hanya mencakup redistribusi pendapatan, tetapi juga mencakup transformasi sosial-ekonomi yang lebih luas yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Perspektif holistik ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menyoroti sifat pertumbuhan inklusif yang memiliki banyak aspek, dan menekankan perlunya pendekatan komprehensif untuk mengatasi kesenjangan sistemik²³. Dalam konteks Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pertumbuhan inklusif berarti membangun lingkungan di mana dunia usaha secara aktif terlibat dan memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas yang lebih luas. menekankan peran penting UKM dalam mendorong pertumbuhan inklusif, mengingat potensi mereka dalam menciptakan lapangan kerja, memacu inovasi, dan mengkatalisasi pembangunan ekonomi lokal. Penelitian terbaru sejalan dengan sentimen ini, menunjukkan bahwa UKM dapat berfungsi sebagai mesin pertumbuhan inklusif bila dilengkapi dengan sumber daya dan dukungan yang diperlukan.

Manajemen inklusif memiliki beberapa ciri utama yang menjadi dasar penerapannya dalam berbagai organisasi. Beberapa faktornya adalah

²¹ Joanna Szydło et al., “Inclusive Management in a Diversified Cultural Environment,” *Economics and Environment* 87, no. 4 (2023): 1–29, <https://doi.org/10.34659/eis.2023.87.4.688>.

²² Elpisah, “Towards Inclusive Growth: Community-Centered Management Strategies for SMEs.”

²³ Alya Elita Sjioen et al., “Bisnis Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Studi Tentang Dampak Dan Strategi Implementasi,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science* 2, no. 03 (2023): 239–48, <https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i03.557>.

- 1) Partisipasi anggota merupakan pilar utama dalam menciptakan organisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks organisasi produsen, setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan serta dalam kegiatan operasional organisasi. Partisipasi tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran fisik pada rapat, melainkan juga lewat kontribusi ide, pemberian suara, dan keterlibatan dalam penyusunan program kerja. Studi menunjukkan bahwa organisasi yang mengadopsi mekanisme partisipatif cenderung memiliki sistem yang lebih demokratis karena suara anggota benar-benar memengaruhi arah kebijakan dan strategi organisasi. Tingkat partisipasi yang tinggi juga memperkuat rasa memiliki di antara anggota, meningkatkan solidaritas, dan berdampak positif pada produktivitas. Dengan adanya partisipasi aktif, organisasi menjadi lebih tanggap terhadap perubahan serta mampu mempertahankan keberlanjutan melalui kolaborasi dan komitmen bersama.
- 2) Kesetaraan akses merupakan komponen kunci dalam pengelolaan organisasi yang adil dan inklusif. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh anggota harus memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh sumber daya, informasi, dan manfaat organisasi tanpa adanya diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, gender, maupun skala kepemilikan lahan. Berdasarkan temuan menunjukkan bahwa organisasi produsen yang menerapkan prinsip kesetaraan akses terbukti lebih berhasil dalam memberdayakan anggotanya, terutama kelompok petani kecil dan perempuan. Penerapan kesetaraan akses juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi internal dan menumbuhkan rasa saling percaya antaranggota. Ketika seluruh anggota dapat menikmati akses yang sama terhadap pelatihan, modal, dan pasar, organisasi menjadi lebih efisien, kompetitif, serta memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih besar. Dengan demikian, kesetaraan akses tidak hanya mencerminkan nilai keadilan

sosial, tetapi juga menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan organisasi.

- 3) Keterlibatan anggota merupakan bentuk lanjutan dari partisipasi, di mana anggota tidak sekadar hadir dalam kegiatan organisasi, tetapi turut berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Dalam organisasi yang inklusif, keterlibatan berarti adanya ruang bagi setiap anggota untuk menyampaikan pendapat, memengaruhi arah kebijakan, serta turut bertanggung jawab atas keputusan bersama. Studi menunjukkan bahwa tingginya tingkat keterlibatan anggota biasanya ditandai oleh komunikasi internal yang transparan, gaya kepemimpinan yang partisipatif, serta adanya sistem umpan balik yang efektif. Faktor kepercayaan dan kepuasan terhadap transparansi manajemen juga turut memperkuat keterlibatan anggota. Ketika anggota merasa dihargai dan pendapat mereka diperhatikan, loyalitas terhadap organisasi meningkat, yang pada akhirnya mendukung kinerja kolektif dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, keterlibatan anggota tidak hanya menjadi hasil dari manajemen yang baik, tetapi juga mencerminkan budaya organisasi yang menghormati dan menghargai setiap kontribusi individu²⁴.

Studi Elpisah menunjukkan adanya hubungan positif antara kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan kinerja perusahaan, khususnya pada UMKM yang mengadopsi praktik manajemen inklusif berbasis komunitas seperti yang diterapkan dalam paguyuban Sumurpandan. Selain itu, korelasi positif antara keterlibatan pemangku kepentingan dengan daya saing dan ketahanan UMKM menegaskan bahwa strategi pengelolaan yang berpusat pada masyarakat membawa berbagai manfaat nyata. UMKM yang secara aktif melibatkan

²⁴ Mercy Mwambi, Jos Bijman, and Patience Mshenga, “Which Type of Producer Organization Is (More) Inclusive? Dynamics of Farmers’ Membership and Participation in the Decision-Making Process,” *Annals of Public and Cooperative Economics* 91, no. 2 (2020): 213–36, <https://doi.org/10.1111/apce.12269>.

komunitas dan memasukkan kepentingan pemangku kepentingan ke dalam kerangka operasionalnya tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kinerja keuangan, daya saing, dan ketahanan usaha dalam menghadapi dinamika bisnis²⁵

Selain itu, peran keterlibatan pemangku kepentingan muncul sebagai faktor penentu kinerja dan ketahanan UMKM. Hatak dkk menekankan pentingnya membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan komunitas lokal, pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan daya saing UMKM. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan membina saluran komunikasi terbuka, UMKM dapat memperoleh wawasan berharga, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul, dan merespons secara efektif terhadap perubahan dinamika pasar. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan kapasitas adaptasi UMKM namun juga memperkuat izin sosial mereka untuk beroperasi, sehingga memitigasi risiko ²⁶

2. Pendekatan Berbasis Komunitas

Komunitas merupakan kelompok individu yang memiliki kesamaan dalam hal nilai, norma, tujuan, atau kepentingan tertentu, serta saling berinteraksi dalam suatu wilayah atau ruang sosial tertentu²⁷. Dalam konteks penelitian ini, komunitas Paguyuban Sumurpandan di Toko Azalea dapat dianggap sebagai kelompok sosial yang memiliki tujuan bersama dalam meningkatkan pendapatan anggotanya melalui manajemen inklusif berbasis komunitas. Konsep komunitas ini relevan untuk memahami dinamika sosial

²⁵ Elpisah, “Towards Inclusive Growth: Community-Centered Management Strategies for SMEs.”

²⁶ Hatak I, Roessl D, and Harms R, “Affective Commitment as a Mechanism to Increase Innovative Work Behavior of Employees in SMEs,” *Jurnal Manajemen Inovasi Produk* 33 (5) (2016): 590–603, <https://doi.org/10.1002/hrdq.21156>.

²⁷ Akmat Syaifudin and Supriyono Supriyono, “Pembentukan Dan Pengembangan Paguyuban UMKM Kalirungkut Sebagai Komunitas Daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian UMKM,” *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 3 (2023): 112–22, <https://doi.org/10.55606/nusantara.v3i3.1451>.

dan ekonomi yang terjadi dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota melalui kolaborasi dan partisipasi aktif dalam kegiatan bersama.

Pendekatan berbasis komunitas adalah suatu pendekatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan atau pemberdayaan yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam seluruh proses mulai dari identifikasi kebutuhan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan berbasis komunitas menekankan pada peran aktif anggota Komunitas Paguyuban Sumurpandan untuk bersama-sama membangun sistem manajemen usaha yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan bersama.

Pendekatan berbasis komunitas menjadi pondasi utama dalam membangun manajemen inklusif, di mana kolaborasi dan pemberdayaan anggota menjadi elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang berkeadilan. Peningkatan perekonomian masyarakat merupakan salah satu program utama pemerintah sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat perekonomian masyarakat, salah satunya melalui kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini diterapkan bersamaan dengan krisis ekonomi nasional dan global, yang semakin memperumit tantangan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Melalui program otonomi daerah, pendekatan pembangunan ekonomi lokal (local economic development) sebaiknya difokuskan pada penguatan dan pemanfaatan potensi local²⁸.

Ketekunan masyarakat dalam berwirausaha dapat menjadi kekuatan ekonomi yang kuat, terutama jika dikelola secara profesional dan modern. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan membangun usaha berbasis komunitas, yang memungkinkan masyarakat memiliki daya saing lebih baik. Pendekatan ini juga membantu mereka menghadapi persaingan

²⁸ Imam Mutakin and Taufik Ridwan, “Strategi Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas (Studi Kasus Konveksi Jack Tailor Di Desa Ciperna),” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 1, no. 1 (2020): 51–59, <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.10>.

serta mengatasi fluktuasi harga, yang sering kali menjadi tantangan akibat keberadaan tengkulak. Karena tengkulak berinteraksi langsung dengan individu, mereka memiliki kemampuan untuk menentukan harga secara sepihak sesuai dengan kesepakatan transaksi.

3. Peningkatan Pendapatan

Menurut ilmu ekonomi, pendapatan diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan tetap mempertahankan kondisi kekayaan pada akhir periode sama seperti pada awalnya. Tingkat pendapatan per kapita mencerminkan daya beli masyarakat; semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar pula daya beli, sehingga permintaan terhadap barang cenderung meningkat²⁹. Peningkatan pendapatan dalam konteks bisnis dapat diartikan sebagai bertambahnya nilai pendapatan dari yang telah ada sebelumnya. Hal ini tidak selalu berkaitan dengan peningkatan penjualan atau kenaikan harga, tetapi juga dapat disebabkan oleh penurunan biaya operasional maupun pengurangan inefisiensi. Selain itu, peningkatan pendapatan juga dapat dimaknai sebagai pertumbuhan yang terjadi melalui peningkatan jumlah pajak yang dibayarkan oleh individu dan perusahaan. Adapun peningkatan pendapatan masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan daya beli keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, sosial, serta kebutuhan lainnya, yang tercermin dari bertambahnya penghasilan³⁰.

Peningkatan pendapatan anggota merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penerapan manajemen inklusif berbasis komunitas. Dalam konteks Komunitas Paguyuban Sumurpandan di Kecamatan Baron, sistem manajemen yang partisipatif dan berkeadilan menjadi dasar dalam

²⁹ Fauzan Haqiqi, Rahma Dewi Susanti, and Ferawati, “Analisis Pengaruh Pemberian Modal Kerja Dan Biaya Produksi Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun (Tahun 2014 – 2018),” *Jurnal Cafetaria* 1, no. 1 (2020): 63–72, <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v1i1.54>.

³⁰ Saritasik Wilan, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pada Pelaku Usaha Mikro Di Kota Batam,” *IAKN TORAJA*, no. 2 (2021): 167–86.

menciptakan lingkungan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Pendekatan inklusif memungkinkan setiap anggota untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan kegiatan usaha, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata. Untuk memahami lebih dalam hubungan antara manajemen inklusif dan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota, pembahasan berikut difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu laba (profit), income (pendapatan anggota), dan pertumbuhan perusahaan atau organisasi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi tolok ukur efektivitas manajemen inklusif dalam memperkuat kinerja ekonomi komunitas

a) Laba (Profit)

Laba mencerminkan hasil finansial dari kegiatan usaha yang dijalankan organisasi, serta menjadi dasar utama dalam mengukur kinerja ekonomi komunitas. Dalam sistem manajemen inklusif, laba tidak hanya dianggap sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai alat pemerataan kesejahteraan anggota. Faktor internal seperti modal sendiri dan volume penjualan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan laba koperasi, di mana partisipasi aktif anggota dalam pengelolaan usaha turut memperkuat efisiensi dan produktivitas organisasi³¹

b) Income (pendapatan anggota)

Pendapatan anggota merupakan indikator langsung dari kesejahteraan ekonomi individu dalam komunitas. Manajemen inklusif berperan penting dalam menciptakan akses yang setara bagi semua anggota terhadap sumber daya, pelatihan, dan peluang usaha. Keanggotaan dalam koperasi atau organisasi inklusif secara signifikan meningkatkan pendapatan rumah tangga, karena anggota memperoleh manfaat dari peningkatan produktivitas, efisiensi pemasaran, dan

³¹ Azhari Azhari, "Increase in Profit Based on Internal Capital and Business Volume in Cooperatives in Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 8 (1) (2024): 23–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.36555/almana.v8i1.2461>.

pembagian keuntungan yang merata³². Selain itu temuan penelitian yang lain menegaskan bahwa koperasi berbasis komunitas dan ekologi mampu memperkuat efek peningkatan pendapatan, terutama bila didukung oleh sistem manajemen yang transparan dan partisipatif³³. Temuan ini relevan dengan konteks Paguyuban Sumurpandan yang menekankan kerja sama dan pemberdayaan lokal sebagai basis peningkatan ekonomi anggota.

c) Pertumbuhan dan keberlanjutan komunitas

Peningkatan laba dan pendapatan anggota secara langsung mendorong pertumbuhan organisasi komunitas. Dalam sistem manajemen inklusif, pertumbuhan bukan hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari sejauh mana organisasi mampu memperluas manfaat sosial bagi seluruh anggotanya.), penerapan keuangan inklusif dalam koperasi berperan penting dalam memperluas akses ekonomi masyarakat dan memperkuat pertumbuhan organisasi³⁴

Pendapatan anggota paguyuban dan Toko Azalea dapat ditingkatkan melalui penerapan manajemen inklusif berbasis komunitas. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif semua anggota dalam pengambilan keputusan dan operasional toko, yang dapat memperkuat modal sosial dan meningkatkan kinerja ekonomi. Studi oleh Isnaini menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategis dalam paguyuban ritel komunitas dapat mengoptimalkan kinerja toko dan meningkatkan pendapatan³⁵. Selain itu, penelitian oleh Ariendra menekankan pentingnya strategi pemberdayaan

³² Yang Zou and Qingbin Wang, “Impacts of Farmer Cooperative Membership on Household Income and Inequality : Evidence from a Household Survey in China,” *Agricultural and Food Economics*, 2022, <https://doi.org/10.1186/s40100-022-00222-x>.

³³ Li Ma et al., “Can Cooperatives Enhance the Income-Generating Effect of Eco-Industries for Farmers ?— Empirical Evidence from the Crested Ibis National Nature Reserve , China,” 2024, 1–18.

³⁴ Khaerunnisa, “Inclusive Finance In Cooperatives For Community Empowerment Through MSME Development In The City Of Tarakan,” *Agribusiness Journal* 4, no. 2 (2021): 0–4, <https://doi.org/10.31327/aj.v4i2.1662>.

³⁵ Isnaini Muhammad Fahmi, *Manajemen Strategi Sampoerna Retail Community Dalam Pengembangan Usaha Toko Kelontong (Study Kasus Paguyuban Src Brebes Barat Kabupaten Brebes)*, 2023, <http://repository.uinsaizu.ac.id/22735/>.

dalam paguyuban untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui peningkatan pendapatan. Dengan demikian, manajemen inklusif berbasis komunitas berperan signifikan dalam meningkatkan pendapatan anggota dan toko dalam konteks paguyuban³⁶. Peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja karyawan, kepemimpinan, dan motivasi kerja. Menurut Skousen dalam penelitiannya, pendapatan perusahaan dapat berasal dari *operating revenue*, yaitu pendapatan dari aktivitas utama bisnis yang dilakukan secara berulang, serta *non-operating revenue*, yang berasal dari transaksi di luar kegiatan utama, seperti penjualan aset atau investasi. Peningkatan pendapatan merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan, karena setiap pelaku usaha tentunya ingin mengetahui besarnya nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama menjalankan usahanya³⁷. Kinerja karyawan menjadi faktor utama dalam meningkatkan pendapatan, di mana menurut Mangkunegara, kinerja yang baik dapat diukur dari kualitas dan kuantitas hasil kerja dalam periode tertentu. Jurnal ini menunjukkan bahwa kinerja karyawan yang tinggi berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan Perusahaan³⁸.

4. Peran Paguyuban dalam Pengelolaan Ekonomi Komunitas

Paguyuban berasal dari kata guyup yang artinya akur atau bersama. Paguyuban menurut KBBI adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya³⁹. Paguyuban merupakan suatu organisasi informal yang berlandaskan kasih sayang dan

³⁶ Ahmad Fariz Ariendra, “Strategi Pemberdayaan Paguyuban Bumi Semendung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi Pada Lapak UMKM Bumi Semendung Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun),” 2023.

³⁷ Fauzan Haqiqi, Rahma Dewi Susanti, and Ferawati, “Analisis Pengaruh Pemberian Modal Kerja Dan Biaya Produksi Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun (Tahun 2014 – 2018).”

³⁸ Suprasiono and Kristya Damayanti, “Meningkatkan Pendapatan Ditinjau Dari Kinerja Karyawan Sebagai Dampak Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja (Studi Kasus Pada BPR Nusumma Jatim Cabang Godang Malang),” *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)* 1, no. 1 (2016): 78–91.

³⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima,” n.d.

persaudaraan, di mana anggotanya menjunjung tinggi solidaritas, toleransi, serta prinsip subsidiaritas. Organisasi ini memanfaatkan perbedaan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama, dengan anggotanya terikat oleh hubungan batin yang tulus, bersifat alami, langgeng, serta memiliki keselarasan dalam perasaan dan tujuan⁴⁰.

Paguyuban adalah kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, kekal, serta sehati-sejiwa. Dalam konteks UMKM, paguyuban dapat berfungsi sebagai wadah bagi para pengusaha kecil untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam memasarkan produk mereka. Salah satu bentuk kerjasama yang umum adalah dengan menitipkan hasil produksi mereka ke toko sembako setempat. Melalui pendekatan ini, para pengusaha UMKM dapat memperluas jangkauan pasar tanpa perlu memiliki toko sendiri, sementara toko sembako dapat menawarkan beragam produk kepada pelanggan mereka. Model kerjasama ini tidak hanya meningkatkan efisiensi distribusi produk, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan ekonomi di antara anggota komunitas⁴¹.

⁴⁰ M Putra and Deny Kurnia, “Peran Paguyuban Sadariyah Jaya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri” (IAIN Kediri, 2019), <https://etheses.iainkediri.ac.id/1894/>.

⁴¹ Putra and Kurnia.